Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)
Volume 01 Nomor 05 Tahun 2020 (Hal: 87-96)
https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTREN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEAUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DINAS PERIKANAN KAB.SUBANG)

Dhea Putri Rahayu

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: dheaputrirahayu561@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :
Tgl. Masuk: 26 Juni 2020
Tgl. Diterima: 8 September 2020
Tersedia Online: 30 September 2020

***Keywords**:*
Implementation of Government Accounting Standards, Government Internal Control Systems, and Quality of Local Government Financial Statements.

ABSTRAK/*ABSTRACT*

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui hubungan Pengaruh penerapan standar akuntansi , dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemetintahan daerah di dinas perikanan kabupaten subang .Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah Theory agency .Terdapat hubungan antara penerapan standar akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Terdapat hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah

PENDAHULUAN

Sejak runtuhnya era orde baru dan bergulirnya era reformasi pemerintahan Indonesia mulai merintis dalam mewujudkan tujuan reformasi di Indonesia. Telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar yaitu menetapkan sistem pemerintahan yang bagus. Dalam perubahaan suatu sistem dibidang keuangan Negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan dibidang akuntasi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia diberbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk menetapkan sistem pemerintahan yang bagus setidaknya ditandai dengan tiga prinsip utama yaitu transparasi partisipasi, dan akuntabilitas untuk mewujudkan terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel pada lingkup pemerintahan, maka dibutuhkan adanya perubahan dan pembaharuan dalam hal kebijakan akuntansi, yaitu SAP. Dengan adanya perubahan dan pembaharuan tersebut, maka SAP diharapkan mampu memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara lebih baik (Setiawan & Gayatri, 2017). Maka dari itu pemerintah indonsia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Tujuan penerapan Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdampak pada penigkatan kualitas pelaporan keuangan dipertintah pusat maupun daerah. Pada proses laporan keungan dan realisasi anggaran diharapkan pemerintah pusat/ daerah dapat menerapkan peraturan pemerintah NO.71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintah berbasis

akrual untuk menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 tentang penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual pada sektor pemerintahan. Pada faktanya dilingkungan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya menerapkan peraturan pemerintah NO.71 Tahun 2010

Dalam UU No.17 Tahun 2003.pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5(lima) tahun setelah diterbitkannya UU tersebut. Namun karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang pasti dan khusus mengenai SAP berbasis akrual, dan diperkuat pula oleh penjelasan pada pasal yang sama dalam 17 tahun 2003, menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis kas. Sehingga sebagai pedoman pelaksanaa SAP dikeluarkan PP No.24 dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2005 tentang penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Kemudian sejak dikeluarkan PP No.71 Tahun 2010, maka SAP berbasis akrual telah memiliki landasan hukum sendiri untuk menerapkannya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan regulasi tersebut, yakni dengan tidak lagi menggunakan basis kas dalam menerapkan SAP, tetapi mulai menggunakan basis akrual selambat-lambanya 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan PP tersebut. Sehingga pada tahun 2015 seluruh sector pemerintahan harus sudah menerapkan basis akrual secara penuh. Seperti yang dinyatakan dalam UU No .1 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1) bahwa bentuk dan isi laporan keuangan pertanggujawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Maka dalam hal ini adalah penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1). Dengan adanya perubahan SAP basis kas menuju basis akrual, maka akan membawa dampak bagi pengelolaan keuangan Negara (putra dan Ariyanto, 2015)

Dalam saat pelaksanaan kegiatannya. Pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kesalahan dan penyalahgunaan terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal,serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. (Riandani, 2017). Dengan banyaknya kasus penyelewengan, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan keuangan Negara, pemborosan anggaran.dan kualitas laporan keuangang pemerintah yang buruk merupakan salah satu dampak adanya pelaksanaan sistem pengendalian internal yang lemah atau kurang baik (Widari & Sutrisno, 20017). Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 537 LKPD yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017, mengungkapkan bahwa terdapat 6.053 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.156 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Untuk wilayah kabupaten Subang, pemerintah belum memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan di kabupaten Subang sehingga belum berjalan dengan efektif dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibuat. Hal ini di buktikan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD tahun 2011 yang menyatakan ada delapan daerah jawa barat yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Daerah yang dimaksud salah satunya adalah kabupaten Subang. Pengecualian

dalam opini tersebut adalah apabila kabupaten/kota melakukan perbaikan yang signifikan terhadap LKPD tahun 2011 dan 2012 artinya melakukan rekomendasi dari BPK sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah kota depok (www.suarajabar.com).

Hasil penelitian terdahulu, penelitian Endang (2019) menyatakan bahwa secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya Vania(2019) variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima, dengan artian bahwa variable Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian mengenai sistem pengendalian internal penelitian Endang (2019) dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Sedangkan Vania(2019) dapat disimpulkan variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima, dengan artian bahwa variable Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan perbandingan antara beberapa penelitian sebelumnya, tampaknya ada konsistensi dalam hasil studi dari beberapa variabel yang mempengaruhi integritas perbaikan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengkaji variabel penelitian untuk mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endang Dermawan tahun 2019 tentang" Pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah ". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek yang digunakan yaitu pada pemerintahan daerah di dinas perikanan kab.subang. berdasarkan latar belakang di atas, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah " pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap pemerintahan daerah (studi kasus dinas perikanan kab.subang)"

Dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ? 2) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?. oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menguji & membuktikan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. 2).Untuk menguji & membuktikan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitaslaporan keuangan.

Bedasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul"pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus dinas perikanan kabupaten subang)

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Prinsip utama teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi), dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". Dalam lingkup pemerintahan, hubungan keagenan tersebut juga terjadi yaitu antara rakyat yang berperan sebagai prinsipal dan

pemerintahan yang berperan sebagai agensi (Riandani, 2017). Dalam penelitian ini, pemerintah merupakan agen yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi salah satu tolak ukur dari pertanggungjawaban pemerintah selaku agen kepada masyarakat selaku prinsipal.

Definisi Akuntansi

Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012:36). Akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan (Smith dan Skousen, 2009:3). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan akuntasi adalah proses pencatatan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data mengenai kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan orang lain yang menggunakannya.

Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010:137) yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

b. Tujuan SAP

Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggung jawabkan. Standar akuntasi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai dapat menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam proses pemeriksaan (Mardiasmo. 2004: 149).

c. Jenis SAP

Menurut Rahayu, dkk (2014) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis yaitu :

1) SAP berbasis akrual

Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Melalui SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik. . Suatu pemerintahan yang menerapkan SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan.

2) SAP berbasis kas menuju akrual

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,

belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian,pengukuran,pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Darise, 2009:77).

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Mahmudi, 2011: 103). Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010: 137). manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Basis Akrual

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain (Bastian, 2010: 120):

1. penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Menurut PP 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Komponen laporan keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA),Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih (Laporan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).Penerapan SAP berbasis akrual di dalam lingkungan pemerintah yaitu pada pemerintah pusat,pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Langelo, Saerang, & Alexander, 2015). Pada PP 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa SAP Berbasis Akrual dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Teori Akuntabilitas

Menurut Udoyono (2012) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan, dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Tolak ukur atau indikator pengukuran akuntabilitas adalah kewajiban individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui pengukuran yang seobyektif mungkin. Dalam penelitian ini, laporan keuangan dikatakan berkualitas jika bersifat transparan dan akuntabel

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa:
"Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah". Sistem Pengendalian Internal terdiri dari beberapa unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Karakteristik kualitatif laporan keuangan mencakup: relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami

Pengendalian Intern

Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu keterandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Roviyanti (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan pengendalian internal yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi adalah salah satu bentuk informasi yang paling penting karena diciptakan untuk mengidentifikasikan, merakit, menganalisa dan melaporkan transaksi serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan utang dari suatu pemerintah daerah, sedangkan komunikasi yang baik yang terjalin antar personel pemerintah daerah dapat memudahkan terjadinya perputaran informasi, hal ini akhirnya dapat menambah akurasi dari suatu laporan keuangan (Anindita, 2006:230)..

Hubungan antara pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan melalui seberapa baik pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin baik pengendalian internal dalam suatu institusi pemerintah, maka akan berdampak juga pada semakin tinggi kualitas laporan keuangannya.

Hasil penelitian terdahulu, penelitian Endang (2019) menyatakan bahwa secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya Vania(2019) variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima, dengan artian bahwa variable Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hubungan Pengaruh Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dinas

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et all (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control).

Menurut Wawan (2009:578) pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan secara efektif dapat mengakibatkan sistem akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan berjalan dengan baik, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, pemeberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakuakan dapat menjadi jaminan yang cukup tidak hanya untuk sistem akuntansi keuangan daerah,

namun memberikan pula jaminan yang cukup bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai, dilaksanakannya pengawasan intern yang efektif dan kontinyu pada kegiatan dapat menjamin kinerja pemerintah daerah tercapai dengan baik.

Hasil penelitian mengenai sistem pengendalian internal penelitian Endang (2019) dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Sedangkan Vania(2019) dapat disimpulkan variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima, dengan artian bahwa variable Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kerangka Pemikiran

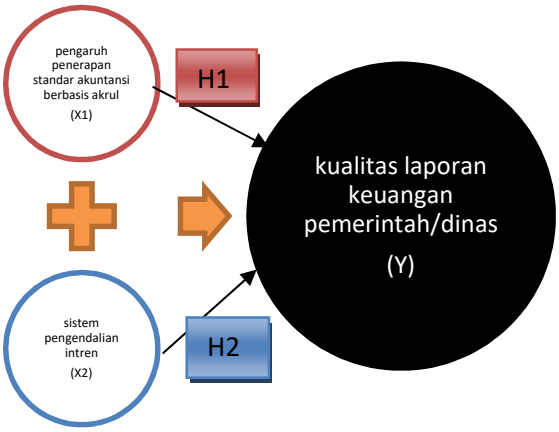

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Hasil penelitian terdahulu, penelitian Endang (2019) menyatakan bahwa secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya Vania(2019) variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima, dengan artian bahwa variable Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dalam penelitian lainnya yaitu yang dilakuan oleh Natalia Christianti, (2013) akuntansi berbais akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Keranayanti, (2016) bahwa, sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kulitas laporan keuangan. Agustiawan, (2016) dengan hasil bahwa Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif Pada kualitas laporan keuangan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Dinas

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu

organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Yoga Gustika,2017).

Hasil penelitian mengenai sistem pengendalian internal penelitian Endang (2019) dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Sedangkan Vania(2019) dapat disimpulkan variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima, dengan artian bahwa variable Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dalam hasil penelitian lainnhya yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Susilawati, (2014), sistem pengendalian intern secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Munasyir, (2015) dengan hasil bahwa sistem pengendalin intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Natalia Christianti, (2013) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jumiartini, (2015) menemukan hasil bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kiranayanti (2016) dengan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kulitas laporan keuangan. Berdasrkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Sistem pegenalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan

KESIMPULAN

Dari beberapan uraian dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keungan perpengaruh positif artinya Akuntansi berbasis akrual berpengaruh Pada kualitas laporan keuangan hal ini bermakna bahwa dengan adanya pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka akan berdampak pada peningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan perpengaruh positif artinya Sistem pegenalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan itu artinya hal ini bermakna bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

REFERENCES

Anindita, Primastuti. 2006. Kualitas Sistem Pengendalian Intern Sebagai Penentu Tingkat Kepercayaan Laporan Keuangan Suatu Pemerintah Daerah. Widyapraja, Vol. 32, No. 3, Tahun 2006.

Bastian, Indra. 2010.”*Sistem Informasi Sektor Publik”. Jakarta: Badan Penerbit Salemba Empat.*

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II. PT Indeks, Jakarta.

Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.

Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, *3*(1), 1–8. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta

Mardiasmo. 2004. "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Rahayu, Liza, Kennedy, Anisma, Yuneita. 2014."Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". JOM FEKON, Vol I, No.2.

Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang*. Retrieved from http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395

Setiawan, I. W. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017): 671-700*, *21*, 671–700. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33858

Udoyono, K. (2012). E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 3 No.1 Februari 2012*, 135–171. Retrieved from http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/153

UU No.17 Tahun 2003.pasal 36 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008). Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).Indonesia.

Putra, I.W.G.Y.D. and Ariyanto, D. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1: 14-32.

Warren, S.Carl., and Reeve, M.James., and Fess, E.Philip. 2005. Corporate Financial Accounting. South Western: Thomson

Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi FE UNSIL, Vol. 4, No. 1, 2009.

Bastian, Indra. 2010."*Sistem Informasi Sektor Publik". Jakarta: Badan Penerbit Salemba Empat.*

www.suarajabar.com